

BAB IV

SIKAP INDONESIA TERHADAP REVOLUSI DI SURIAH

A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Revolusi di Suriah

Indonesia merupakan Negara merdeka dan berdaulat senantiasa berperinsip pada anti kolonialisme, bebas aktif dan selalu mendukung upaya pemeliharaan ketertiban dunia berdasarkan atas pancasila dan UUD 45 sebagai implementasi hasrat dan cita-cita bangsa. Atas perinsip itulah Indonesia turut serta menentang segala bentuk imperialism, kekerasan dan turut serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini berarti Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional, dituntut secara aktif menentang terajadinya segala bentuk kekerasan yang terjadi di belahan bumi mana pun, serta berkewajiban untuk ikut berjuang menyusun ketertiban dunia dan memelihara perdamaian, demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

1.3 Pernyataan Sikap Indonesia terhadap Revolusi di Suriah

Dalam konteks revolusi yang terjadi di Suriah yang telah menimbulkan konflik dan jatuhnya korban jiwa yang terbilang sangat banyak, Indonesia telah turut serta mengambil kebijakan luar negerinya dengan memberikan sikapnya guna mewujudkan ketertiban dunia, khususnya Suriah. Sejak meletusnya revolusi di Suriah pertengahan maret 2012, sikap Indonesia tetap konsisten terhadap revolusi itu ialah bahwa permasalahan di Suriah

harus melalui dialog, proses politik bukan melalui kekerasan apalagi kekerasan terhadap warga sipil. Indonesia tetap mengecam aksi kekerasan yang dilakukan di Suriah terhadap warga negaranya sendiri. Hal tersebut bukan hanya sekedar retorika belaka dan kemudian lepas tangan atau tidak peduli terhadap Suriah.

Indonesia selama ini menekankan perlu segera dihentikannya aksi kekerasan serta perlu di dorongnya proses politik sehingga aspirasi rakyat Suriah dapat dihormati. Posisi dasar Indonesia ini disampaikan juga saat Menlu RI melakukan komunikasi dengan Menlu Turki, Ahmet Davutoglu, pada tanggal 10 Februari 2012. Komunikasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menggalang kepedulian masyarakat internasional dan untuk memupuk kembali kesatuan pandangan dan sikap masyarakat internasional terhadap perkembangan di Suriah khususnya dalam mengedepankan dihentikannya aksi kekerasan. Kedua Menlu membahas berbagai opsi untuk menyatukan pandangan dan sikap masyarakat internasional untuk menghentikan kekerasan di Suriah termasuk kemungkinan penyelenggaraan konferensi Internasional. "Kami menekankan agar penggelaran suatu konferensi internasional untuk mencapai hal termaksud perlu bersifat inklusif dan menampilkan kesatuan pandangan masyarakat internasional" kata Menlu RI.⁷⁶

⁷⁶ Indonesia desak penghentian kekerasan Suriah,
<http://www.deplu.go.id/Lists/News/DispForm.aspx?ID=5447>

Sebelumnya, sikap Indonesia ini juga telah disampaikan Menlu RI saat bertemu dengan Sekjen PBB di Markas Besar PBB di New York pada saat kunjungan Menlu RI tanggal 6 Februari 2012. Gagalnya DK PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi mengenai Suriah pada february 2012 lalu, dan meningkatnya aksi kekerasan serta jatuhnya korban sipil di Suriah, membuat pemerintah Indonesia segera mendesak dihentikannya tindak kekerasan kepada rakyat sipil dan mendorong digulirkannya proses politik di Suriah. "Indonesia selama ini menekankan perlu segera dihentikannya aksi kekerasan serta perlu di dorongnya proses politik sehingga aspirasi rakyat Suriah dapat dihormati."⁷⁷

2.3 Peran Aktif Indonesia dalam Upaya Mengatasi Krisis di Suriah

Sebagai wujud dari kepedulian Indonesia iktu berperan aktif dalam mengatasi krisis yang menimpa Suriah. terhadap krisis yang terjadi di Suriah, Indonesia memberikan dukungan aktif terhadap rencana enam point damai dari Kofi Annan yang berisikan; penarikan pasukan militer Suriah dan alat-alat perang dari kota-kota di Suriah, penetapan permanen gencatan senjata, negosiasi politik, pemberian akses untuk bantuan kemanusiaan, penglepasan para tahanan, dan penerbitan pengesahan untuk kegiatan beragam media.⁷⁸

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Kofi Annan Bahas "Rencana Annan"

<http://internasional.kompas.com/read/2012/05/30/17043357/Kofi.Annan.Bahas.Rencana.Annan>. diakses 3 juli 2012.

Indonesia menegaskan terciptanya kemerdekaan di Suriah bukan hanya secara politis, Indonesia telah menjadi bagian dari misi PBB untuk meninjau pelaksanaan kemerdekaan itu. Hal tersebut di nyatakan oleh Menlu RI, atas instruksi Presiden RI, sebagai wujud keprihatinan Pemerintah Indonesia terhadap tindak kekerasan dan jatuhnya korban di Suriah, sejak bulan Nopember 2011 Pemerintah Indonesia telah memanggil Dubes RI di Damaskus, Suriah kembali ke Indonesia untuk konsultasi.

Indonesia telah menugaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berjumlah 6 (enam) orang perwira berangkat ke Suriah sebagai bagian Tim Pengamat atau Pemantau PBB yang bertugas untuk mengawasi implementasi gencatan senjata atas permintaan Sekjen PBB. Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui permintaan mendadak Sekjen PBB, namun disyaratkan bahwa di lapangan berlangsung gencatan senjata dan pengiriman tim pemantau atas nama PBB tersebut atas persetujuan Pemerintah Suriah. Karena waktu yang mendesak, proses rekrutmen melalui prosedur normal tidak bisa dilakukan, maka 6 orang Perwira TNI tersebut diambil dari Kontingen Indonesia yang tengah bertugas pada pasukan penjaga perdamaian PBB, dan saat ini bertugas di UNAMID (*United Nations Hybrid Operation in Darfur*), UNMIL (*United Nations Mission in Liberia*), MONUSCO (*Mission de l'Organisation de republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo*) dan UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) untuk dipindahkan sementara ke Suriah. Personel TNI yang ditugaskan terdiri dari Mayor Aulawi Imam (UNAMID), Kapten Laut

Dharma Yoga Gede (UNMIL), Mayor Muhammad Anom Kartika (MONUSCO), Mayor Ratih Pusparni (UNIFIL), Kapten Laut Nani Kusminati (UNIFIL) dan Mayor Hery Darmawan (UNIFIL). Keterlibatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan kapabilitas *Peacekeepers* Indonesia yang melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB.

Indonesia juga meminta bantuan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lebih meningkatkan peranannya dalam menangani berbagai masalah dunia. Presiden SBY meminta OKI turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah Suriah. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan hal tersebut se usai mendampingi menerima Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan Komisi HAM OKI di Kantor Presiden Senin 20 Februari 2012. Yang intinya bagaimana negara-negara OKI lebih meningkatkan peranan dalam masalah revolusi Suriah. Sebelumnya, Menlu Marty, pernah mengirimkan surat kepada Menlu Kazakhstan Yerzhan Kazykhanov sebagai Ketua OKI pada tingkat Menlu sekarang, agar OKI mengadakan persidangan khusus mengenai masalah Suriah. Indonesia melihat kondisi Suriah tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, malah sebaliknya. Tentu OKI memiliki potensi sebenarnya untuk lebih menyuarakan pandangan dan menjadi bagian dari solusi. Bagaimana pun OKI diharapkan bisa lebih memainkan peranannya dalam menghadapi masalah-masalah di kawasan. Terkait dipilihnya Jakarta sebagai tempat pertemuan pertama Komisi Independen Permanen HAM OKI di Jakarta, 20-24 Februari, Menlu menilai hal demikian merupakan cerminan

pentingnya Indonesia dalam ruang OKI. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di antara anggota OKI. Hal tersebut dimaksudkan agar HAM dan demokratisasi menjadi bagian utama dari kerjasama OKI.

Sebagai wujud kepedulian terhadap krisis yang terjadi di Suriah, pada tanggal 24 Februari 2012, Indonesia menghadiri International Conference of the Friends of the People of Syria, di Tunis, Tunisia. Sebuah pertemuan akbar yang membahas masalah Suriah. Lebih dari 60 negara dan organisasi internasional hadir dalam konferensi tersebut, di antaranya Prancis, Jerman, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, PBB, Uni Eropa, GCC, OKI, Liga Arab, Uni Maghreb Arab dan Uni Afrika. Delegasi RI, dipimpin oleh Duta Besar RI Tunis, Muhammad Ibnu Said, menyampaikan posisi Indonesia yang menuntut segera dihentikannya aksi kekerasan terhadap rakyat sipil dan menyerukan diambilnya langkah dialog politik yang inklusif, dalam kerangka penghormatan terhadap kesatuan nasional dan integritas teritorial negara Suriah. Indonesia juga mengajak komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah diplomatik untuk menyelesaikan masalah di Suriah secara damai. Dalam kesempatan tersebut, Delri juga menyambut baik penunjukan Koufi Annan sebagai utusan khusus PBB dan Liga Arab untuk Suriah.⁷⁹

Dan pada bulan Juli 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan rekomendasi kepada sekjen PBB mengenai perdamaian Suriah.

⁷⁹ KBRI Tunis:Delegasi RI Tegaskan Posisi Indonesia Soal Konflik Suriah, <http://www.kemlu.go.id/Pages/Embassies.aspx?IDP=7678&l=id> diakses pada 26 Juni 2012

SBY menyatakan bahwa pertikaian di Suriah telah semakin mengkhawatirkan. Konflik yang berkepanjangan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian dan bertambahnya jumlah korban jiwa, yang mayoritas adalah warga sipil yang tak berdosa. Pemerintah Indonesia mempunyai empat rekomendasi terkait penyelesaian konflik di Suriah dan eekomendasi tersebut telah disampaikan Presiden SBY ke Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-mon. *Pertama*, dengan sangat segera, perlu dilakukan penghentian tindakan kekerasan, bahkan pertempuran. "Menurut pendapat saya, situasi ini Suriah sudah bisa disebut sebagai perang saudara," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19, Juli 2012. Rekomendasi *kedua*, Presiden mengatakan, jika mandat yang ada tidak cukup untuk menghentikan semua bentuk kekerasan, maka Indonesia berkeyakinan bahwa sudah saatnya untuk mempertimbangkan penyesuaian mandat berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB. Perubahan pada intinya mentransformasi misi utama PBB, dari semata memelihara perdamaian menjadi misi menciptakan perdamaian.

Ketiga, Presiden juga menyarankan agar upaya menciptakan perdamaian benar-benar ditujukan untuk menciptakan perdamaian yang saat ini tidak lagi terdapat di Suriah. "Namun, upaya penciptaan perdamaian ini tidak perlu dikaitkan dan tidak harus senantiasa dikaitkan dengan tuntutan perubahan kekuasaan politik ataupun keberlanjutan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa di Suriah," kata Presiden. Menurut Presiden, proses politik yang mencerminkan dan menghormati keinginan dan kehendak rakyat Suriah tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun dapat digulirkan segera

setelah upaya menciptakan perdamaian telah berhasil dilakukan. kemudian, yang *keempat*, untuk suksesnya misi penciptaan perdamaian, Indonesia berpandangan sangatlah mungkin untuk kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB membentuk peacemaking force di bawah bendera PBB. "Membangun perdamaian secara terpadu di Suriah tentunya harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam operasi perdamaian PBB," kata Presiden.⁸⁰

3.3. Upaya Penanggulangan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di Suriah

Meningkatnya eskalasi konflik di Suriah menyebabkan keamanan di negara ini tidak menentu. Tentu kondisi tersebut akan mengancam keselamatan warga asing di Suriah, termasuk warga Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah bertindak segera mengambil keputusan dalam hal penyelamatan warga negara Indonesia yang menyebar di daerah-daerah konflik. Menurut Dubes Dimas Samodra, evakuasi dilakukan dua kali setiap bulan ke Indonesia dengan jumlah anggota bervariasi setiap evakuasi. Namun belum mengetahui jumlah total WNI yang masih berada di negara bergolak tersebut. Sejumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Suriah juga turut dievakuasi. Meskipun sejumlah negara telah menutup Kedutaan Besarnya, KBRI Damaskus masih beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya, pada Februari lalu, KBRI Damaskus

⁸⁰ Empat Rekomendasi SBY untuk Konflik Suriah <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/19/2304197/Empat.Rekomendasi.SBY.untuk.Konflik.Suriah> diakses pada Juli 2012

mengeluarkan maklumat kepada seluruh WNI di Suriah untuk mendaftarkan diri terkait rencana evakuasi.⁸¹

Pemerintah RI menyatakan memprioritaskan keselamatan WNI yang tinggal atau bekerja di Suriah, sehubungan dengan terjadi konflik berkepanjangan di negara Timur Tengah tersebut. Sejauh ini sampai bulan Juli, sudah 18 kloter WNI yang sudah dipulangkan ke Indonesia. Jumlah seluruhnya sudah 600-an orang. WNI yang belum dikeluarkan dari wilayah konflik saat ini ditampung di Kedutaan Besar RI.⁸² Untuk mempermudah proses kepulangan, KBRI akan membuka dua kantor perwakilan konsuler tambahan di Aleppo dan Latakia.

Sejak 9 Agustus 2011, Indonesia telah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Suriah karena perlindungan TKI yang dinilai belum maksimal di negara itu. Sementara itu, kepada para TKI/PLRT di daerah rawan konflik, Menakertrans menghimbau agar dapat segera datang ke KBRI dan shelter terdekat yang disediakan antara lain di Damaskus, Latakia dan Aleppo untuk pendataan dan dievakuasi. Sementara itu, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) menyatakan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pemerintah di Suriah untuk membantu

⁸¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/unum/12/05/31/m4w2d3-dubes-ri-wni-di-suriah-mulai-dievakuasi>.

⁸² <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/21/19592825/18.Kloter.WNI.Dipulangkan.dari.Suriah>

penyelesaian permasalahan TKI/PLRT dan membantu proses evakuasi TKI/PLRT di Suriah.

Sementara hambatan kepulangan WNI yang di Suriah untuk kembali ke tanah air yaitu terkendala kelengkapan surat-surat keimigrasian terutama untuk mereka yang bekerja sebagai TKI. Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI di Damaskus, di mana pihak KBRI juga harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian Suriah, agen tenaga kerja Suriah dan majikan TKI yang bersangkutan. Kendala lain yakni kesulitan untuk mendapat exit-permit dari majikan. Tidak sedikit majikan yang tidak boleh mengizinkan TKI untuk pulang ke tanah air kendati situasi keamanan di Suriah tengah bergejolak. Oleh sebab itu butuh pendekatan dan kesabaran untuk bernegosiasi dengan majikan. Tanpa exit-permit, tiket pesawat tidak berguna. Biaya kepulangan WNI di Suriah seluruhnya ditanggung pemerintah Indonesia. Kesulitan untuk memulangkan seluruh WNI yang bekerja di Suriah juga, terutama yang bekerja di sektor domestik, karena masalah keamanan dan juga komunikasi. Dan ada pula kendala dari majikan tempat TKI bekerja yang tidak mau memulangkan pekerja mereka. Karena pemulangan TKI harus disertai surat ijin dari majikan berupa pembatalan kontrak dan membayar kompensasi.⁸³

B. Pemaknaan Indonesia terhadap Revolusi Suriah

Meletusnya revolusi di Suriah adalah akibat dari api revolusi yang menjalar dimulai dari Tunisia dan beberapa negara di Timur tengah lainnya

⁸³ Koran-tempo.terbit 06/05/2012.

kemudian merembet ke Suriah. Meletusnya revolusi itu juga dipicu dari kondisi internal dalam negeri di mana rezim Asaad selaku pimpinan Suriah telah mengekang kebebasan warganya dan dinilai otoriter dan diktator dalam menjalankan roda kekuasaannya. Bagi Indonesia, memaknai meletusnya revolusi di Suriah berarti memaknai demokrasi. Menurut Marty, perkembangan di Timur Tengah dan Afrika Utara; Tunisia, Mesir, Libya termasuk Suriah, semua merupakan wujud adanya defisit demokrasi dan kurangnya pembangunan dari negara-negara tersebut. Marty menegaskan, jadi suka atau tidak suka, lambat laun harus mengembangkan institusi dan kapasitas demokrasi.

Negara-negara Timur -- Tengah yang dilanda revolusi kurang menjalankan demokrasi, karena itu penting bagi Suriah untuk menjalankan demokrasi yang sepenuhnya. Sifat-sifat otoriter ataupun dictator sangat bertentangan dengan nilai demokrasi karena itu juga tidak mencerminkan hati nurani rakyat. Revolusi yang terjadi di Suriah adalah upaya rakyat suriah menuntut perubahan menuju system demokrasi yang seutuhnya. Di mana kebebasan warga tidak dikakang atau tidak diintimidasi. Sejak kepemimpinan Hafez al-Asaad hingga Basyar al Asaad, Suriah selama ini militer mendapatkan peran utama.

Sejak pecahnya revolusi Suriah, Indonesia meletakkan penyebab revolusi yang terjadi di Suriah semata-mata karena demokrasi yang tidak dijalankan secara penuh. Indonesia tidak beranggapan bahwa penyebab revolusi Suriah adalah kejahatan politik dari Amerika, seperti yang dinyatakan

Iran. Bagi Indonesia revolusi yang berlangsung di Suriah adalah sesuatu yang wajar yang terjadi pada suatu Negara. Namun yang amat disayangkan ketika pihak-pihak asing ikut serta dalam campur tangan memperkeruh suasana atas nama kepentingan.

Pada pertemuan dengan Hillary, Presiden menekankan pentingnya kesatuan pandangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan terciptanya perdamaian di Suriah. Kedua negara sepakat, konflik di negara di Timur Tengah tersebut dapat semakin mendalam jika tak segera diselesaikan. Pengakhiran konflik di negara yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al-Assad adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar.⁸⁴ China memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Indonesia yakni menginginkan agar penderitaan warga sipil... di Suriah segera dihentikan. Yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah masalah kemanusiaan, bagaimana secepat mungkin situasi di Suriah dapat stabil sehingga perdamaian dapat tercipta. Peran China sebagai anggota tetap DK PBB memiliki tanggung jawab khusus dalam menciptakan kondisi stabil dan damai di Suriah.⁸⁵

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan prihatin dengan konflik berkepanjangan di Suriah yang menelan ratusan korban dari

⁸⁴<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/04/12550876/Hillary.Ikuti.Sikap.Indonesia.soal.Suriah>

⁸⁵ Khairisa Ferid, *Terkait Kasus Suriah, China Sejalan dengan Indonesia*
<http://international.okezone.com/read/2012/08/10/411/676229/terkait-kasus-suriah-china-sejalan-dengan-indonesia>

kalangan sipil. "Apa yang terjadi di Suriah saat ini sangat memprihatinkan...Saya mengikuti, korban terus bergantian, tidak ada tanda-tanda solusi yang cespleng dilakukan Kofi Annan ataupun DK PBB," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, pada pertengahan Juli, mengenai memburuknya situasi kemanusiaan di Suriah. Ia menilai hingga bulan ke-16 konflik tidak ada tanda-tanda penghentian pertempuran yang berkecamuk yang telah mengakibatkan ratusan korban dari kalangan sipil. Kepala Negara juga menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB mencapai kata sepakat guna mengakhiri tragedi kemanusiaan di negara itu. Dan sebenarnya SBY sudah mengirimkan rekomendasi kepada PBB kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon, namun hal itu hal itu masih dipahami jika PBB masih kesulitan untuk mencapai kata sepakat guna menyikapi konflik berkepanjangan di Suriah.

Walaupun begitu, Presiden berharap negara-negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB yang memiliki kekuatan penuh untuk menentukan sikap PBB dapat mencari solusi segera guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Ia juga mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Suriah menjadi tanggung jawab moral bersama karena tidak mungkin dunia internasional berdiam diri menyaksikan hal itu. SBY pun kembali menekankan betapa pentingnya kesatuan pandangan Dewan Keamanan PBB untuk bisa memastikan dicapainya perdamaian atau diakhirinya konflik di Suriah.

Bagi pemerintah Indonesia, mengusir utusan Suriah bukanlah bentuk yang baik sebagai protes terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad, yang terus menyerang warga sipil tak berdosa. Pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengusir siapa pun. Indonesia percaya bahwa, dalam situasi memburuk dan sulit cara mengintensifkan perundingan dan dialog hal paling penting. Pemerintah di seluruh dunia mengusir duta besar dan diplomat Suriah, sebuah pukulan terkoordinasi biasa untuk rezim Assad, menyusul pembantaian mengerikan di Houla. Jepang mengikuti jalan yang diambil oleh AS, Inggris, Kanada, Australia, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Belanda dalam mengusir diplomat Suriah.

Wakil Presiden Boediono, pada Jumat, 31 Agustus 2012, dijadwalkan berpidato di forum Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB). Kepada pers Indonesia yang meliput KTT GNB ini di Tehran, Boediono menjelaskan sejumlah isu krusial dan posisi Indonesia yang disampaikan di hadapan pemimpin 120 negara GNB, diantaranya masalah Suriah. Wakil Presiden Indonesia telah secara khusus menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB mengambil sikap yang bulat dalam mengakhiri konflik di Suriah. Pada Pembukaan KTT, Kamis, 30 Agustus 2012, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menolak keras segala bentuk intervensi asing di Suriah. Sedangkan Presiden Mesir Mohammad Morsi malah terang-terangan mendorong perubahan mendasar di Suriah dan siap menawarkan bantuan untuk sebuah "Suriah baru yang merdeka". Pernyataan Morsi membuat delegasi Suriah walk-out meninggalkan ruang sidang. Dalam berbagai

kesempatan, Indonesia selalu meminta Dewan Keamanan PBB segera menyelesaikan perbedaan internalnya dan memutuskan apa yang seharusnya dilakukan di Suriah, dalam konteks penghentian kekerasan dan jatuhnya ribuan korban di sana. Mengenai solusi politiknya kelak, biarlah hal itu ditentukan sendiri oleh rakyat Suriah.

C. Netralitas Indonesia terhadap Revolusi di Suriah

Selama berlangsungnya revolusi yang terjadi di Suriah telah melibatkan pihak asing masuk dalam arena konflik, sehingga situasi bertambah runyam. Amerika, Liga Arab, dan Negara-negara Eropa mendukung pihak oposisi yang menghendaki penggulingan Asaad, dengan memberikan bantuan terhadap oposisi. Sementara China, Rusia dan Iran merupakan sekutu dari pemerintahan Suriah yang membela secara "matimatian" pihak rezim pemerintah Asaad, di antaranya dengan memveto resolusi yang telah diajukan oleh PBB. Hal tersebut mengakibatkan ketegangan antara dua kubu. Kubu yang pro oposisi dan pemerintah.

Dalam mengambil pandangan mengenai revolusi yang sedang berlangsung di Suriah, Indonesia mengambil pandangan bahwa setiap Negara berhak atas kondisi dalam negerinya. Marty mengatakan bahwa Indonesia berperinsip mengakui kedaulatan negara tanpa memandangi sosok yang memerintah. Indonesia dalam posisi politiknya hanya memberi pengakuan pada negara, sehingga perubahan sistem pemerintahan tidak mengharuskan Indonesia memberi atau tidak memberi pengakuan pada pihak manapun

juga.⁸⁶ Berkaitan dengan konflik antara pihak oposisi dan rezim, Indonesia pun telah menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah Suriah dan kaum pembangkang.⁸⁷ Indonesia selama ini tidak pernah menunjukkan sikap, apakah mendukung Amerika maupun sekutu Suriah.

Dari pernyataan Marty, bisa dilihat bahwa Indonesia menjunjung netralitas. Tidak berada pada posisi apakah Indonesia memihak Rezim Suriah maupun pihak oposisi. Indonesia dalam hal ini mencoba untuk bersikap tidak ikut campur tangan terhadap urusan dalam negeri Suriah. Suriah berhak menentukan nasibnya sendiri. Netral bagi Indonesia berarti Indonesia tetap menentang segala bentuk penjajahan maupun kekerasan yang terjadi baik kekerasan yang timbul oleh pihak oposisi maupun sebaliknya. Hal itu demi terciptanya ketertiban dan keamanan dunia.

Netralitas Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Suriah itu menunjukkan bahwa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas aktif mempunyai makna ketegasan bahwa Indonesia dalam menentukan dan menjalankan politik luar negerinya bersikap mandiri. Dalam hal ini bebas berarti tidak memihak salah satu kubu baik oposisi maupun rezim, sedangkan aktif berarti Indonesia secara aktif ikut serta dalam pergaulan internasional, mendorong upaya ketertiban dunia, demi mewujudkan keamanan dunia. Politik bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional bukan politik netral

⁸⁶ <http://www.merdeka.com/dunia/indonesia-tolak-akui-pemberontak-suriah.html>

⁸⁷ *ibid*

yang acuh tak acuh. Politik bebas aktif tidak mengikatkan diri kepada salah satu blok dunia dan ditujukan untuk menghapus ekspansionisme. Kepentingan nasional di sini merupakan upaya Indonesia untuk menghindarkan diri dari segala bentuk intervensi yang dapat membahayakan kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah suatu Negara dan menimbulkan ketegangan dunia. Bisa diartikan juga bahwa kepentingan nasional Indonesia lebih bersifat menjaga kemakmuran dunia.

Dalam langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia, Indonesia pun tidak terlibat polarisasi kubu, Indonesia tidak mendukung kubu sekutu Suriah yang mendukung pihak rezim mempertahankan kekuasaannya dengan melakukan hak veto sebagai upaya penolakan terhadap resolusi yang telah dikeluarkan PBB, sehingga mengundang reaksi dan kecaman internasional. Begitu juga Indonesia, tidak mendukung kubu Amerika dan Negara-negara Eropa yang membela mati-matia pihak oposisi agar rezim Asaad tumbang dari tampuk kekuasaannya. Indonesia lepas dari 'blok-blok' tersebut, walau pun demikian Indonesia tetap menjalin hubungan dengan pemerintah Suriah. Hal itu terlihat saat utusan pemerintah Suriah melakukan kunjungan ke Indonesia, Indonesia dengan tangan terbuka menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Republik Arab Suriah, Abdullah Al-Dardari, pada tanggal 22 April 2012 di Kementerian Luar Negeri.⁸⁸ Pertemuan yang membahas terutama pada upaya peningkatan hubungan kerjasama di antara kedua negara khususnya ekonomi dan perdagangan. Wakil PM Suriah mengungkapkan keinginan negaranya

⁸⁸ Copcit.bbc.uk

untuk dapat bertukar pikiran dan memperoleh lebih banyak pengetahuan dari Indonesia termasuk mengenai langkah-langkah privatisasi BUMN yang dianggap berhasil dilakukan oleh Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Nata Legawa, menyampaikan harapan pertemuan itu akan menjadi awal peningkatan kerjasama kedua negara yang lebih erat. Menlu juga mengundang Suriah untuk dapat menghadiri peringatan berdirinya Gerakan Non Blok (GNB) yang akan dilaksanakan di Bali.

Penyambutan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia terhadap kunjungan pemerintah Suriah ke Indonesia, secara politis menandakan bahwa walaupun Negara Suriah sedang mengalami konflik yang disebabkan pihak oposisi yang menginginkan rezim pemerintah Suriah segera lengser dari kekuasaannya, Indonesia berusaha menjaga hubungan dengan Negara Suriah tersebut supaya tetap berjalan dengan baik. Indonesia juga selalu mendorong Negara- negara maupun organisasi internasional untuk turut serta terlibat sebagai solusi dalam mengatasi krisis di Suriah.

Langkah Indonesia mengajak masyarakat internasional dan mendesak agar konflik Suriah yang saat ini terjadi dapat dikatakan sebagai perang saudara harus segera dihentikan merupakan langkah tepat, apa lagi penyelesaiannya dengan jalur diplomasi. Selama ini Indonesia termasuk negara paling aktif dalam turut menjaga perdamaian dunia. Berdasarkan laporan PBB, Indonesia menempati urutan 15 dari 177 negara yang paling banyak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia. Apa yang diupayakan pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian konflik di Suriah,

merupakan apresiasi terhadap masyarakat di dunia dan sebagai bentuk realisasi pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945.

PBB selaku dewan keamanan, PBB pun terus mengupayakan agar proses perdamaian terwujud untuk mencegah timbulnya korban jiwa yang lebih banyak. PBB melakukan pemantauan dengan mengirim Tim pemantau di beberapa titik kota di suriah seperti Idzlib, Damaskus, Homs, Houla guna memonitor pergolakan senjata di negeri itu sekaligus mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung lebih dari setahun. Pengiriman pertama, enam pemantau sudah mulai bekerja pada Senin, 16 April 2012. Tim pemantau bertolak dari New York setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan satu resolusi pada Sabtu, 14 April 2012 yang berisi soal kewenangan lembaga internasional itu untuk masuk ke negeri pimpinan Bashar al-Assad. Enam dari 30 anggota misi pengamatan PBB akan bekerja keras melaksanakan tugas yang diemban.

Misi yang diusulkan sangat memberikan kontribusi untuk mengamati dan menjunjung tinggi komitmen semua pihak demi menghentikan kekerasan bersenjata dalam segala bentuk. Suriah pun menyambut baik kehadiran pemantau PBB dan mengharapkan bahwa tim bersedia menyaksikan "kejahatan kelompok-kelompok teroris bersenjata". PBB juga memperingatkan bahwa Presiden Bashar al-Assad harus menaati sepenuh satu janji untuk "menghentikan gerakan pasukan ke daerah-daerah penduduk,

menghentikan penggunaan seluruh senjata berat di daerah permukiman, dan mulai menarik pasukan militer dari sekitar daerah-daerah penduduk."⁸⁹

Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB menguatkan tim pemantau di Suriah dengan mengirim jumlah personil sebanyak 300 personel pada bulan Mei. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyepakati resolusi yang mewenangi penyebaran awal hingga 300 pengamat militer tak bersenjata ke Suriah selama tiga bulan untuk memantau gencatan senjata dalam konflik 13 bulan negara itu. Resolusi yang disusun Rusia-Eropa itu disebut UNSMIS (penyebaran misi pengamat PBB) yang didukung pada penilaian oleh Sekretaris Jenderal (Ban Ki-moon) mengenai perkembangan yang relevan di lapangan, termasuk penghentian kekerasan."⁹⁰ Akan tetapi operasi tim pemantau yang berkisar 300 orang, terpaksa dihentikan itu tanggal 16 Juni lalu, karena resiko keamanan yang diterjadi di Suriah. PBB mengatakan, para penyerang menarget tim pemantau beberapa kali dengan senjata api dan bom.⁹¹

Sementara, Kofi Annan selaku utusan khusus PBB dan Liga Arab terus berupaya mendamaikan kelompok yang bertikai untuk melakukan

⁸⁹ [http://id.berita.yahoo.com/tim-pemantau-di-suriah-diusulkan-tiga-bulan-051935817.html](http://id.berita.yahoo.com/tim-pemantau-di-suriyah-diusulkan-tiga-bulan-051935817.html);

⁹⁰ <http://id.berita.yahoo.com/dk-pbb-sepakati-kenaikan-sampai-300-pemantau-gencatan-033313033.html>;

⁹¹ PBB akan Putuskan Masa Depan Tim Pemantau untuk Suriah
<http://www.voaindonesia.com/content/pbb-akan-putuskan-masa-depan-tim-pemantau-untuk-suriyah/1363757.html>

gencatan senjata.⁹² Sebelumnya, gencatan senjata telah diberlakukan 12 April berdasarkan satu persetujuan antara Bashar dan utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan namun dilanggar, dengan adanya pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak anti-Bashar. Gencatan senjata di Suriah diusulkan utusan PBB Kofi Annan. Kofi Annan, telah menerima jaminan tertulis dari kementerian luar negeri Suriah bahwa pasukan pemerintah akan "menghentikan semua pertempuran militer di seluruh wilayah Suriah pada 06:00 waktu setempat." Pemerintah Suriah menyatakan bersedia mematuhi gencatan senjata, tetapi mereka akan menyerang apabila diserang terlebih dulu. Sikap serupa juga ditunjukkan kelompok pemberontak yang menyatakan akan balas menyerang jika diserang.⁹³ Secara umum kedua pihak menaati kesepakatan, tapi masih membutuhkan waktu yang panjang untuk memenuhi situasi yang stabil, serta banyak masalah rumit yang harus diurai sebelum melangkah kepada penyelesaian politik.

Kofie Annan juga akan membentuk pemerintahan transisi. Dalam pertemuan para Diplomat di Jenewa telah mencapai kesepakatan soal Suriah bahwa pemerintahan transisi akan dibentuk dan dapat mencakup anggota pemerintah sekarang, oposisi dan kelompok lain, dan dibentuk atas dasar kesepakatan bersama. Kofie Annan dalam proposalnya menjelaskan bahwa

⁹² PBB Kirim Tim Pemantau. www.tempo

⁹³ http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241962:barat-ragukan-gencatan-senjata-di-suriyah&catid=16:internasional&Itemid=29

kami telah menyediakan pedoman dan prinsip-prinsip untuk membantu para pihak Suriah ketika mereka bergerak maju bersama pemerintahan transisi.

Utusan PBB urusan hak asasi manusia Navi Pillay menyerukan pula agar militerisasi harus dihentikan dengan segala cara karena baik dari pasukan pemerintah dan pemberontak sama-sama membahayakan nyawa warga sipil. Sejumlah negara diduga menyediakan bantuan senjata dan dana untuk kedua pihak yang bertikai. Diduga Arab Saudi dan Qatar memasok senjata untuk Pasukan Pembebasan Suriah (FSA) dan bahkan membayar gaji para tentaranya.

Salah satu strategi Kofie Annan untuk mewujudkan perdamaian yaitu dengan mengunjungi sekutu Suriah, diantaranya Iran, Iran merupakan sekutu terkuat Suriah. Kehadiran Annan di Negeri Mullah itu sebagai upaya menghentikan pertikaian senjata menuju perang saudara di Suriah. Dengan alasan Iran memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Suriah. Karena itu negeri itu bisa ambil bagian menyelesaikan masalah, begitulah anggapan Annan dalam pertemuannya bersama Menteri Luar Negeri Iran, Ali Akbar Salehi, di Teheran. Iran menentang intervensi pasukan asing untuk menyelesaikan krisis. Menurut Salehi, "perubahan di Suriah" hanya bisa di bawah kepemimpinan Assad.

Seperti halnya yang dilakukan Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mendekati sekutu Suriah lainnya yaitu China. Ban meminta bantuan menteri luar negeri China menggunakan pengaruhnya

untuk membantu menekan Presiden Suriah Bashar al-Assad mengakhiri konflik. China merupakan salah satu pemain kunci di Dewan Keamanan PBB menyangkut sanksi-sanksi terhadap pemimpin Suriah. China selama ini menyokong Rusia dalam menentang tuntutan pihak Barat bagi aksi-aksi internasional untuk menekan Assad. PBB meminta China untuk menggunakan pengaruhnya guna memastikan adanya penerapan "penuh dan segera" terhadap rencana perdamaian rancangan utusan PBB-Liga Arab, Kofi Annan, dan komunike internasional, yang disepakati China pada 30 Juni lalu --yang menyerukan bagi transisi politik di Suriah. Dewan Keamanan PBB pada Juli ini harus mengeluarkan resolusi untuk memperbaharui mandat Misi Pengawasan PBB di Suriah (UNSMIS). Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman dan Portugal menginginkan sanksi ditambahkan dalam resolusi tersebut jika Assad tidak menarik persenjataan berat sesuai dengan yang digariskan dalam rencana perdamaian Kofi Annan. Rusia menolak ide pemberian ancaman untuk sanksi-sanksi bagi Suriah. Rusia dan China, sebagai anggota permanen Dewan Keamanan sudah dua kali menggunakan kekuatan mereka untuk menolak (veto) resolusi yang berbau sanksi.⁹⁴

Sekjen PBB, Ban Ki-moon melakukan pendekatan terhadap sekutu Suriah lainnya yaitu Rusia. Mendesak Rusia untuk meningkatkan tekanan terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad. Hal itu disampaikan Ki-moon selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Ban,

⁹⁴ Sesjen PBB Desak China Gunakan "Pengaruh" Dalam Masalah Suriah.
<http://id.berita.yahoo.com/sesjen-pbb-desak-china-gunakan-pengaruh-dalam-masalah-042240157.html>

meminta Rusia untuk menggunakan pengaruhnya guna memastikan penuh dan segera pelaksanaan rencana perdamaian utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan. Ban dan Lavrov membahas situasi di Suriah dan keharusan yang mendesak untuk menghentikan kekerasan.⁹⁵

⁹⁵ PBB Kembali Desak Rusia untuk Pengaruhi Assad.
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/18/m7bu5j-pbb-kembali-desak-rusia-untuk-pengaruhi-assad>